



WTP Bukan Tujuan Akhir, Laporan Pertanggungjawaban Penting untuk Perencanaan Selanjutnya

Jakarta, 12 September 2019 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel. Dalam sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan, Keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. "Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya" ujar Menkeu.

Menkeu mengharapkan agar pemanfaatan laporan keuangan tidak hanya menggunakan laporan di Kementerian Lembaga masing-masing. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dikonsolidasikan juga penting dalam memberikan peta yang lengkap dalam menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran.

Selain itu, Pemerintah juga terus mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan antara sistem informasi keuangan pusat atau sistem perbendaharaan (SPAN) dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah (SIKD). "Jadi nanti kita berharap adanya konsolidasi secara real time dan itu akan menjadi sumber informasi yang *powerful* bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat dan bahkan dunia usaha" ujar Menkeu.

Di acara ini juga dilakukan peluncuran aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) *Mobile Online*. *BAS Mobile Online* ini merupakan aplikasi berbasis android. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan dari 542 kabupaten/kota dan 34 provinsi dapat diakses dan diunduh melalui aplikasi *mobile*, tidak hanya dari *website*. Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah memahami dan menggunakan berbagai segmen akun baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pelaporan keuangan melalui gawai.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema "Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju". Kegiatan ini dilakukan dari 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang andal dan relevan. Selain itu, para peserta dapat berbagi informasi terkait pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dan basis data dalam rangka penyediaan informasi keuangan negara yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Dalam kegiatan ini juga, akan diberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP, sekaligus memberikan edukasi kepada K/L yang belum memperoleh opini WTP. Pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada K/L yang memperoleh opini WTP selama 5 kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018. Penghargaan ini diberikan kepada 36 (K/L) (rincian terlampir).

Selanjutnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah juga menyampaikan penghargaan BMN Award kepada 11 K/L dalam 3 kategori (terbagi dalam 3 kelompok K/L) yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu *Continuous Improvement* dan *Peer Collaboration*. Menkeu mengatakan, “Saya ingin memberikan apresiasi BMN kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN”. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Menkeu meminta untuk terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep/cara kerja baru mengikuti perkembangan teknologi digital. Misalnya, konsep cost sharing atau open space akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif.

Rakernas ini akan dilengkapi dengan *talkshow* yang membahas Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju, dengan pembicara-pembicara yaitu Wakil Menteri Keuangan, Direktur Utama LPP TVRI, Anggota KSAP dan Presiden Bukalapak. Selain itu juga akan dibuka pula layanan edukasi dan konsultasi yang meliputi empat bidang yaitu Akuntansi BMN, Standar Akuntansi Pemerintahan, Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pelaksanaan Anggaran untuk membahas tuntas permasalahan masing-masing K/L terkait pengelolaan maupun pelaporan keuangan.

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat. Pada akhirnya, dengan pengelolaan keuangan yang sehat, akan terwujud Indonesia yang kuat, mandiri dan berdaya saing dalam mencapai tujuan bernegara.

Narahubung Media: _____

Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

☎ 021 3846663
✉ mediacenter@kemenkeu.go.id

43 K/L Penerima Penghargaan dengan Laporan Keuangan WTP dari 2014-2018

Nomor	Kementerian/Lembaga
1.	Dewan Perwakilan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Daerah
3.	Komisi Yudisial
4.	Badan Pemeriksa Keuangan
5.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
6.	Mahkamah Konstitusi
7.	Mahkamah Agung
8.	Kementerian Dalam Negeri
9.	Kementerian Perindustrian
10.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
11.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
12.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
13.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
14.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
15.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
16.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
17.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
18.	Lembaga Administrasi Negara
19.	Badan Kepegawaian Negara
20.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22.	Kementerian Sekretariat Negara
23.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24.	Kementerian Keuangan
25.	Kementerian Perhubungan
26.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27.	Kementerian Kesehatan
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
31.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
32.	Kementerian Perdagangan
33.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
34.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
35.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
36.	Badan Intelijen Negara
37.	Dewan Ketahanan Nasional
38.	Badan Narkotika Nasional
39.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
40.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
41.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
42.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
43.	Sekretariat Kabinet

Kementerian/ Lembaga yang memiliki kinerja terbaik dalam 3 kelompok pada 5 kategori

3 Kelompok K/L calon penerima BMN Awards adalah:

- Kelompok 1, yaitu K/L yang memiliki 1 s.d. 10 satuan kerja
- Kelompok 2, yaitu K/L yang memiliki 11 s.d. 100 satuan kerja
- Kelompok 3, yaitu K/L yang memiliki satuan kerja lebih dari 100 satuan kerja

5 kategori BMN Awards tahun 2019, adalah:

1. Utilisasi BMN
2. Kualitas pelaporan BMN
3. Sertifikasi BMN berupa tanah
4. Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*continuous improvement*)
5. Kerjasama Tata Kelola Antar K/L (*peer collaboration*)

Penerima BMN Awards 2019

1. Kategori Utilisasi BMN

Kelompok I : Juara 1: Kementerian Koord. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Juara 2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Juara 3: Komisi Yudisial

Kelompok II : Juara 1: Badan Pemeriksa Keuangan

Juara 2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Juara 3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Kelompok III : Juara 1: Kementerian Sosial

Juara 2: Kementerian Perhubungan

Juara 3: Kementerian Perdagangan

2. Kategori Kualitas Pelaporan BMN

Kelompok I : Juara 1: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Juara 2: Kemenkopolhukam

Juara 3: Dewan Ketahanan Nasional

Kelompok II : Juara 1: Sekretariat Negara

Juara 2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Juara 3: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kelompok III : Juara 1: Kementerian Keuangan

Juara 2: Badan Pusat Statistik

Juara 3: Kementerian Perindustrian

3. Kategori Sertifikasi BMN Berupa Tanah

Kelompok I : Juara 1: Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Juara 2: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Juara 3: Lembaga Administrasi Negara

Kelompok II : Juara 1: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Juara 2: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Juara 3: Kementerian Pariwisata

Kelompok III : Juara 1: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Juara 2: Kementerian Agama

Juara 3: Kementerian Pertahanan

4. Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*) - Kementerian Hukum dan HAM, yang telah mengembangkan inovasi dalam pengelolaan BMN berupa aplikasi rencana kebutuhan aset atau disebut REKAN

5. Kerjasama Tata Kelola Antar K/L (*Peer Collaboration*) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, yang telah bekerja sama dengan baik dalam penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2018